



DOI : <https://doi.org/10.24123/jbt.v7i2.5621>

REORIENTASI PROFIL LULUSAN DAN REFORMASI KURIKULUM SOLUSI LULUSAN TERSERAP LAPANGAN KERJA

Barnad¹, Edith P. Tedjokusumo²

^{1,2}Politeknik Ubaya, Surabaya

Email: edith@staff.ubaya.ac.id²

Masuk 13 April 2023, Terbit 23 Desember 2023

Abstract

Education as a means to increase knowledge and skills and can improve welfare. The higher the level of education, the more experience one gets and the more complex the problems that can be solved, and this has an impact on increasing income. Advances in information and communication technology have changed human civilization. The development of science and technology has made how many jobs done by humans have been taken over by machines so that the remaining work is very little and more specific for humans to do. The curriculum given to the students aims to provide a variety of knowledge and skills so that they can complete various assignments and be placed in various positions. This condition does not meet the needs of the world of work today, because workers only do specific jobs. Another challenge is that several large companies no longer require a diploma for their prospective workers; instead, it is based on the skills certification mastered by future workers. This phenomenon is a challenge for education providers to reorient the profile of graduates who have been determined. One way is to reform the curriculum to improve the student's skills and mastery of digital information literacy, data processing, visualization, and modern office technology so that graduates can work in the modern office era. The narrative above is the premise of the descriptive research that the writer conducted based on various sources of documentation, literature, and questionnaire results from alumni.

Keywords: Curriculum Reform, Graduate Profile, Reorientation, Skills.

Pendahuluan

Kesejahteraan masyarakat merupakan tolak ukur dalam menentukan status sebuah negara, apakah termasuk ke dalam kategori miskin atau kaya. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dapat ditinjau berdasarkan pada data ketenagakerjaan atau tingkat pengangguran. Apabila penduduknya banyak yang

bekerja dan sedikit yang menganggur, maka bangsa tersebut dapat dikatakan sejahtera. Tingkat kehidupan dan kemakmuran bangsa tersebut menjadi lebih baik.

Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pekerjaan>). Pekerjaan dapat diartikan sebagai suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dengan para pekerja/karyawan. Setiap pekerja akan mendapatkan gaji sebagai balas jasa dari pihak perusahaan atau pemberi kerja, jumlahnya tergantung dari jenis profesi yang dilakukan dan berdasarkan kontrak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak (<https://id.wikipedia.org/wiki/Pekerjaan>). Pekerja dapat berasal dari karyawan tanpa persyaratan pendidikan tertentu, akan tetapi apabila pekerjaan didasari dengan pendidikan dan keahlian khusus, maka disebut sebagai profesi. Pendidikan dipercaya sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka semakin besar peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik tingkat penghasilannya.

Institusi penyelenggara pendidikan wajib menetapkan kurikulum. Kurikulum memberikan arah dalam menetapkan tujuan-tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh program studi dalam menentukan kompetensi dan keterampilan yang diinginkan agar lulusan program studi tersebut memiliki pemahaman dan kesiapan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau industri. Kurikulum yang disusun memuat mata kuliah wajib dan pilihan, urutan pengajaran, serta bobot kredit masing-masing mata kuliah. Dengan demikian, kurikulum menjadi panduan agar rangkaian pembelajaran dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Peserta didik pada sebuah pendidikan formal harus menyelesaikan kurikulum pembelajaran dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Apabila seluruh rangkaian pembelajaran telah diselesaikan dan dinyatakan lulus, maka seharusnya peserta didik tersebut memiliki profil lulusan sesuai tujuan pendidikan masing-masing program studi. Setiap lulusan agar dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilannya di tempat kerja dan kehidupan sehari-hari sesuai dengan kompetensi yang diberikan selama melakukan kuliah.

Biro Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia telah mengeluarkan data pada bulan Februari 2022, bahwa tingkat pengangguran Indonesia tercatat sebesar 5.83% dari 208.54 juta total penduduk usia kerja. Sebanyak 14% dari 5.83% penduduk yang menganggur merupakan lulusan jenjang diploma dan sarjana (S1) (<https://www.unair.ac.id/2022/06/20/14-persen-pengangguran-indonesia-lulusan-diploma-dan-sarjana-mengapa>). Informasi ini menunjukkan kompetensi lulusan institusi pendidikan di Indonesia masih tidak relevan dengan tuntutan dunia kerja. Para pelaku pendidikan harus menemukan akar permasalahan yang menjadi penyebab kondisi ini, dan harus segera menemukan solusi agar para lulusannya (alumni) dapat terserap seluruhnya di institusi bisnis, institusi pemerintah atau menjadi seorang wiraswasta.

Kita meyakini sebuah institusi penerima kerja akan merekrut pekerja yang memiliki kesesuaian kompetensi yang dibutuhkan. Jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh setiap alumni tidaklah sama, ada yang bekerja di perkantoran, di pabrik atau bekerja di lapangan. Ketiga jenis pekerjaan ini memiliki tuntutan dan tantangan yang berbeda.

Upaya menyelaraskan antara dunia pendidikan sebagai salah satu penyuplai tenaga kerja terdidik dengan dunia kerja melalui program *link and match*. Program *link and match* dicanangkan sejak tahun 1993 pada era Menteri Pendidikan Prof. Dr. Ing. Wardiman (1993 – 1998). Salah satu implementasi program *link and match* adalah

magang kerja di institusi bisnis atau pemerintah. Magang kerja bertujuan agar para calon lulusan sebelum menjadi alumni memiliki pengalaman berkerja pada sebuah tempat kerja, sehingga setelah menyelesaikan pendidikan dapat langsung bekerja. Pada kenyataannya tidak semua peserta magang dan institusi pendidikannya mendapatkan manfaat secara langsung dari pelaksanaan magang kerja. Beberapa faktor penghambat pelaksanaan magang kerja adalah: (a) waktu pelaksanaan magang kerja terbatas dan selama melakukan magang kerja, peserta magang tetap berkewajiban menyelesaikan materi belajar, sehingga saat melakukan magang tetap mengerjakan tugas-tugas dari materi belajar, (b) masih banyak institusi bisnis atau pemerintah yang merasa terganggu dengan keberadaan peserta magang kerja, karena kompetensi peserta magang tidak memenuhi kriteria pekerjaan yang tersedia, (c) banyak dokumen dan data-data rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang dari luar institusi.

Institusi bisnis atau pemerintah dituntut untuk mendukung kebijakan *link and match*. Sehingga walaupun terdapat peserta magang yang tidak berkompoten akan tetap diterima, tetapi ditempatkan pada bagian yang tidak mengganggu keseluruhan aktivitas pekerjaan, seperti penerima tamu, operator telepon, fotocopy dokumen.

Proses pendidikan dengan program link and match belum dapat dikatakan berhasil, karena pada kenyataannya masih banyak pengangguran terdidik yang terjadi. Kita dapat menyimpulkan bahwa tidak mudah untuk mengimplementasikan program *link and match* antara dunia pendidikan dan institusi bisnis atau pemerintah.

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi di era revolusi industri 4.0 berkembang sangat pesat menyesuaikan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat dituntut agar dapat hidup berdampingan dengan teknologi yang telah diciptakan, serta menguasai dan memanfaatkan hasil ciptaan dari teknologi tersebut. Pada saat ini, karya cipta teknologi yang dihasilkan telah dimanfaatkan di dunia bisnis maupun industri dengan skala besar maupun skala kecil seperti UMKM. Era otomatisasi dan *Artificial Intelligence* berupa *machine learning* telah menggantikan banyak pekerjaan manual yang selama ini dilakukan oleh manusia, hanya tersisa sedikit pekerjaan spesifik yang dapat dilakukan manusia.

Erick Thohir, Selasa (21/6/2022) mengisi kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menyatakan pada tahun 2030 akan ada 9 jenis pekerjaan yang akan hilang akibat dari gencarnya digitalisasi pada semua sektor. Hilangnya pekerjaan akan tergantikan dengan munculnya jenis pekerjaan yang berbasis pada teknologi, seperti:

- a. *Data scientist dan analyst*
- b. *Artifial intelligent expert*
- c. *Software dan game developer*
- d. *Analisis big data*
- e. *Block chain developer*
- f. *Market research*
- g. *Digital marketing*
- h. *Biotechnology*
- i. *Digital content (Youtuber, Tiktok)*

Fenomena ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan pencetak tenaga kerja terdidik. Tantangan lain yang dihadapi oleh dunia pendidikan, yaitu terjadinya perubahan dalam proses penerimaan tenaga kerja. Rekrutmen dengan cara tradisional yang berdasarkan gelar akademik atau pengalaman kerja sudah ditinggalkan, tetapi berdasarkan pada kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan. Contoh berikut menggambarkan cara perusahaan multinasional dalam merekrut karyawan:

1. Google memiliki metode jenius dalam menemukan pekerja yang berbakat dengan program *Google Project Management Certificate*, kursus *online* bersertifikat profesional dan mandiri yang tersedia secara gratis melalui Coursera. Setelah menyelesaikan kursus bersertifikat, Google memberikan kesempatan kepada peserta kursus yang tertarik untuk mencoba salah satu peran manajemen proyek yang disediakan Google (<https://www.inc.com/kelly-main/hiring-google-experience-aptitude.html>). Riwayat aktivitas penyelesaian proyek setiap peserta kursus merupakan sebuah portofolio yang menjadi bahan pertimbangan pihak manajemen Google dalam merekrut karyawan terbaiknya.
2. Tesla sebagai perusahaan dengan spesialisasi mobil listrik, komponen mesin dan memproduksi perangkat pengisi ulang baterai. Perusahaan Tesla dalam melakukan perekrutan karyawan tidak memerlukan gelar akademik. Setiap orang yang memahami tentang *Artificial Intelligence* (AI) dan algoritma *Neural Network* (NN), maka berpeluang menjadi karyawan Tesla.

Perusahaan multinasional lainnya, seperti: Apple, Starbucks, dan IBM melakukan juga proses rekrutmen berdasarkan pada kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan. Akhir bulan Januari tahun 2020, Kemendikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A. (2019 – 2024) meluncurkan program Kampus Merdeka sebagai kelanjutan dari Konsep Merdeka Belajar. Secara umum kebijakannya disebut Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kurikulum kampus merdeka dicanangkan untuk seluruh jenjang pendidikan dari PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi (PT). Kebijakan yang dibuat mempunyai tujuan untuk melakukan penyempurnaan atas konsep pendidikan sebelumnya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) PT dimanfaatkan dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan (Tohir, 2020).

Pendidikan menurut UU nomor 20 tahun 2003 didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Presiden Republik Indonesia, 2003).

Pendidikan yang diberikan di negara Indonesia dibagi atas beberapa jenjang, yaitu Pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, SMA/SMK, Diploma, Sarjana, Master dan Doktor. Masing-masing jenjang memiliki tujuan yang telah ditetapkan. Dalam mewujudkan tujuan pendidikan tersebut disusun dalam sebuah kurikulum. UU nomor 20 tahun 2003 mendefinisikan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Presiden Republik Indonesia, 2003).

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Inovasi pembelajaran termasuk menggunakan metode yang berdaya guna. Perguruan tinggi ditantang untuk mencari metode-metode yang berdaya guna dalam mengevaluasi pengaruh program terhadap sifat belajar mandiri peserta didik. (Barnad, 2021) Berdasarkan pendapat (Sudjana, 2005), praktik adalah metode dalam pembelajaran yang digunakan dengan tujuan melatih serta meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh untuk dilakukan di kehidupan nyata atau lapangan, pekerjaan, atau tugas yang sebenarnya.

Metode praktik dibagi menjadi dua yakni metode praktik terbimbing dan praktik mandiri. Praktik terbimbing merupakan metode praktik dalam pembelajaran, guru memberikan umpan balik agar siswa mengetahui cara praktik sesuai dengan materi yang telah dijelaskan. Sedangkan praktik mandiri yakni metode pembelajaran dengan memberikan kesempatan siswa untuk melakukan praktik secara mandiri (Jacobsen, Eggen, & Kauchak, 2009).

MBKM merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel, sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Proses pendidikan harus memberikan peluang unggul kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan kemampuan mereka (Susilawati, 2020). Pendekatan yang digunakan dalam MBKM, bahwa kurikulum PT bukan merupakan kumpulan mata kuliah, tetapi merupakan rancangan serangkaian proses pendidikan/pembelajaran untuk menghasilkan suatu capaian pembelajaran (Tohir, 2020). Terdapat 4 buah pokok-pokok kebijakan merdeka belajar kampus merdeka untuk jenjang PT. Salah satunya adalah hak belajar 3 semester di luar program. PT wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela:

1. Dapat mengambil sks di luar PT sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks);
2. Dapat mengambil sks di program studi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks).

Sehingga sks wajib yang diambil di program studi asal untuk jenjang Sarjana selama 5 semester dari 8 semester yang harus dijalani (tidak berlaku untuk prodi Kesehatan). Pada konsep Merdeka Belajar terjadi perubahan definisi sks, yaitu:

1. Setiap sks diartikan sebagai “jam kegiatan”, bukan “jam belajar”;
2. Definisi “kegiatan”: Belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (dosen ditentukan oleh PT);
3. Daftar “kegiatan” yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam 3 semester diatas) dapat dipilih dari: (a) program yang ditentukan pemerintah, (b) program yang disetujui oleh rektor (Kemdikbud, 2020).

Daftar contoh kegiatan yang ditentukan oleh pemerintah dan dapat dijadikan rujukan mahasiswa untuk melakukan kegiatan diluar kampus dapat dilihat pada Gambar 1.

Contoh kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus asal

Kegiatan	Penjelasan	Catatan
1 Magang / praktik kerja	Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup)	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
2 Proyek di desa	Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya	Dapat dilakukan bersama dengan aparat desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya
3 Mengajar di sekolah	Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil	Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud
4 Pertukaran pelajar	Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah	Nilai dan sks yang diambil di PT luar akan disetarakan oleh PT masing-masing
5 Penelitian / riset	Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti	Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI / BRIN
6 Kegiatan wirausaha	Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri – dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
7 Studi / proyek independen	Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
8 Proyek kemanusiaan	Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri	Contoh organisasi formal yang dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dan lain-lain

Catatan:

- Semua kegiatan wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
- Kegiatan yang berada di luar Perguruan Tinggi asal (misalnya magang atau proyek di desa) dapat diambil sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks

Gambar 1. Daftar kegiatan mahasiswa di luar kampus

Sumber: (Kemendikbud, 2020)

Hasil dari kegiatan yang telah selesai harus dilakukan proses penyetaraan nilainya. Proses penyetaraan penilaian dapat dilakukan berdasarkan 2 bentuk (Tohir, 2020), yaitu:

1. Bentuk Bebas (*Free Form*) dan, Kegiatan merdeka belajar selama satu semester disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Duapuluh SKS dinyatakan dalam bentuk penilaian kompetensi *hard skills* dan *soft skills* yang memenuhi pencapaian standar capaian pembelajaran. Peserta kegiatan diharuskan membuat portofolio atas kegiatan yang telah dilakukan. Portofolio yang dibuat dapat digunakan sebagai surat keterangan pendamping ijazah (SKPI).
2. Bentuk Terstruktur (*Structured Form*). Apabila kegiatan yang dilakukan dapat dibuat kesetaraannya dengan kurikulum yang ditempuh, maka penilaian hasil kegiatan dapat disetarakan untuk mata kuliah yang tercantum pada saat kegiatan tersebut dilakukan.

Adapun tujuan penelitian adalah memahami seberapa besar perlunya penyesuaian dalam menetapkan konsep MBKM agar perguruan tinggi mampu menyiapkan lulusan dengan gelar akademik tertentu sebagai calon tenaga kerja sesuai dengan bidang pekerjaannya di dunia kerja.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif dengan menelaah berbagai fakta-fakta dari berbagai sumber seperti: Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Sumber lain untuk menunjang penelitian ini dengan melakukan survei kepada para alumni berbagai perguruan tinggi. Survei dilakukan menggunakan fasilitas Google Form yang dikirimkan secara acak. Responden yang menerima permintaan survei telah bersedia untuk menjawab berbagai pertanyaan yang diberikan. Terkumpul sebanyak 107 jawaban yang valid dari para responden. Hasil jawaban para responden dilakukan proses tabulasi dan pembuatan grafiknya menggunakan Microsoft Excel versi 2016.

Pemahaman atas fakta yang didapat menjadi sumber dalam menetapkan konsep yang ditawarkan untuk mencapai tujuan bagi perbaikan kualitas dalam menyiapkan tenaga kerja terdidik sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Salah satu komponen penting dalam menyelenggarakan pendidikan adalah kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kurikulum menjadi panduan bagi tenaga pengajar dalam merancang materi yang akan disampaikan. Bagi calon pembelajar sebelum memutuskan memilih sebuah program studi terlebih dahulu mempelajari kurikulum yang tersedia, karena dalam sebuah kurikulum akan tergambar ilmu pengetahuan dan keterampilan yang akan didapat selama proses belajar serta tujuan yang akan dicapai dengan pembelajaran yang dilakukan. Pada jenjang pendidikan tinggi, setiap program studi diberikan kebebasan untuk menetapkan kurikulum dalam proses pembelajaran sehingga walaupun program studinya sama belum tentu memiliki kurikulum yang sama, karena masing-masing program studi dapat menambahkan mata kuliah muatan lokal sebagai ciri khas program studi. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Presiden Republik Indonesia, 2012).

Kurikulum yang didesain setiap program studi dirancang dengan memperhatikan berbagai pertimbangan, diantaranya:

1. Mata kuliah disusun agar pemberiannya dilakukan secara berjenjang dalam satuan semester;
2. Distribusi mata kuliah (jenjang S1/D4) memiliki tujuan, seperti:
 - a. semester 1 dan 2 untuk meletakkan hal-hal mendasar yang harus dipahami peserta didik;
 - b. semester 3, 4, 5, 6 meletakkan konsep-konsep terhadap keilmuan sesuai program studi;
 - c. semester 7, 8 memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menentukan spesialisasi yang akan didalami dan ini akan tercermin dalam skripsi yang dibuat.
3. Komposisi mata kuliah yang diberikan bertujuan untuk membentuk mahasiswa agar menjadi lulusan yang memiliki kompetensi yang diharapkan.

Pertimbangan dalam merancang kurikulum tersebut, diadopsi untuk seluruh jenjang pendidikan seperti diploma, sarjana dan pascasarjana. Dengan format seperti ini telah banyak lulusan yang dihasilkan dengan berbagai fakta yang didapat, seperti data statistik yang dikeluarkan oleh BPS. Penulis melakukan survei dari tgl 16 Juli s.d 10 Agustus 2022 secara acak terhadap para alumni perguruan tinggi. Survei dilakukan untuk mengetahui aktivitas setelah dinyatakan lulus. Responden yang mengisi kuesioner sebanyak 107 orang lulusan dari berbagai tahun lulus. Tabel 1 menunjukkan aktivitas responden setelah dinyatakan lulus. Responden merupakan lulusan dari tahun 2003 s.d 2022. Tabel 2 merupakan profil dari lulusan yang mendapat pekerjaan. Jenis pekerjaan yang didapat ada yang sesuai dengan bidang kuliah dan tidak sesuai bidang kuliah. Gambar 2 menunjukkan upaya yang dilakukan oleh lulusan yang mendapatkan pekerjaan tidak sesuai bidang kuliahnya.

Tabel 1. Aktivitas Responden (Lulusan) Terkait Dengan Pekerjaan

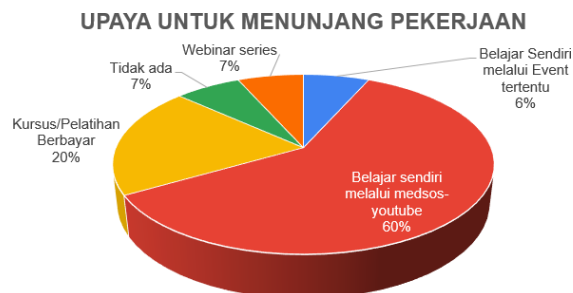
Keterangan	Jumlah	Prosentase
Sudah bekerja sebelum kuliah	7	6.54%
Mendapat Pekerjaan	72	67.29%
Wiraswasta	7	6.54%
Tidak lolos seleksi	11	10.28%
Melanjutkan studi	2	1.87%
Mencari kerja (baru lulus 2022)	8	7.48%
Total Responden	107	100%

Berdasarkan Tabel 1, sebanyak 67.29% mendapat pekerjaan, dan 26.17% tidak bekerja. Lulusan yang tidak bekerja, karena menjadi: wiraswasta, melanjutkan studi, sedang mencari pekerjaan karena baru lulus (2022), dan sebanyak 10.28% tidak lolos seleksi.

Tabel 2. Jenis Pekerjaan Lulusan Yang Mendapat Pekerjaan

Keterangan	Jumlah	Prosentase
Sesuai Bidang Kuliah	57	79.2%
Tidak Sesuai Bidang Kuliah	15	20.8%

Tabel 2 menampilkan data lulusan yang diterima bekerja. Sebanyak 20.8% diterima bekerja pada bidang yang tidak sesuai dengan bidang kuliahnya. Agar pekerjaannya tetap dapat dilakukan, maka sebanyak 60% belajar sendiri melalui media sosial seperti youtube, dan 20% mengikuti kursus/pelatihan berbayar. Sisanya mengikuti webinar series dan belajar sendiri melalui kegiatan yg diselenggarakan. Tampilan data secara grafis dapat dilihat pada Gambar 2. Data ini menunjukkan bahwa lulusan memiliki kemampuan untuk menggunakan segala potensi yang telah dimiliki untuk belajar secara mandiri dan tidak berbayar menggunakan media sosial.



Gambar 2. Upaya yang dilakukan oleh lulusan untuk menunjang pekerjaan, karena bekerja tidak sesuai bidang kuliah

Uraian yang dipaparkan diatas merupakan produk dari kurikulum yang disusun berdasarkan pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, perpres nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Awal tahun 2020 Kemendikbud Ristek meluncurkan kebijakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kebijakan ini merupakan sebuah terobosan yang fenomenal yang dibuat sebagai perluasan makna atas peraturan perundang-undangan dan peraturan yang telah ada. Salah satu ketentuan dari kebijakan tersebut adalah mahasiswa pada jenjang pendidikan tinggi diberikan ijin dan didorong untuk melakukan aktivitas diluar kampus selama 2 semester dan dapat dikonversi kedalam 40 sks, selanjutnya dapat melakukan kuliah selama satu semester pada program studi lain dalam satu institusi sebanyak 20 sks (satu semester). Sehingga total sks yang dapat diperoleh dari kegiatan diluar program studi sebanyak 60 sks (42%).

Penetapan kebijakan MBKM telah memunculkan beberapa pertanyaan, antara lain:

1. Bagaimana kompetensi lulusannya? Karena kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dapat tercapai melalui hasil kolaborasi seluruh mata kuliah yang telah disusun dalam sebuah kurikulum. Dengan konsep MBKM hanya 58% mata kuliah program studi yang ditempuh;
2. Bagaimana mekanisme melakukan evaluasi kegiatan yang dilakukan diluar kampus? dan selanjutnya cara melakukan konversi nilai untuk setiap mata kuliah yang termasuk dalam 40 sks dengan jangkauan nilai dari 0 sampai dengan 100

atau dalam bentuk indeks E, D, C, BC, B, AB, A. Sebagai bahan pertimbangan bahwa capaian belajar masing-masing mata kuliah pada setiap program studi berbeda-beda.

Proses pembelajaran terstruktur pada program studi sebanyak 58% serta kegiatan lapangan diluar program studi harus dapat membentuk kompetensi lulusan. Khusus program MBKM, kompetensi lulusan ditentukan sendiri oleh mahasiswanya sesuai dengan kegiatan yang dipilih. Salah satu bentuk program MBKM yang ditawarkan adalah Kegiatan Magang Kerja/Praktik Kerja pada institusi bisnis atau pemerintahan. Pelaksanaan magang dilakukan selama satu semester dan mahasiswa dibebaskan untuk tidak mengikuti perkuliahan pada semester tersebut dan nilai untuk mata kuliah yang tidak diikuti diambil dari penilaian kegiatan magang kerja. Penulis memilih kegiatan Praktik Kerja sebagai bidang kajian, karena kegiatan ini yang menjadi pilihan bagi mahasiswa program D3 vokasi, seperti Politeknik UBAYA Surabaya. Selain itu, kegiatan Praktik Kerja merupakan kegiatan pembelajaran yang berada diluar kendali kita sebagai penyelenggara pendidikan. Proses dan aktivitas kerja yang dilakukan selama praktik kerja sepenuhnya dikelola oleh institusi bisnis atau pemerintahan dan pada umumnya pola kerja yang dilakukan merupakan kegiatan yang sifatnya berulang, seperti: melakukan surat-menyurat dan register korespondensi, pengarsipan, membuat kas kecil, notulensi, membuat reminder menggunakan Google Calendar, dan Desain Feeds Instagram, merekap berbagai jenis data proyek menggunakan Excel, mengedit dokumen menggunakan aplikasi Nitro, melakukan scan dan mencetak dokumen proyek, selanjutnya membantu bagian keuangan melakukan rekonsiliasi bank, menulis slip pembayaran sampai menyerahkan ke *teller bank*, dan merekap dokumen Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU).

Tanpa ada program MBKM, kegiatan Praktik Kerja sudah diwajibkan bagi mahasiswa semester 5 Politeknik UBAYA dan lamanya waktu pelaksanaan Praktik Kerja adalah 3 bulan. Selama melakukan praktik kerja, mahasiswa tetap dituntut untuk mengikuti kelas perkuliahan yang dilakukan pada malam hari sesuai sks setiap mata kuliah. Sementara dengan mengikuti program MBKM dengan menambah 2 bulan waktu Praktik Kerja, maka mahasiswa tidak perlu mengikuti perkuliahan dan nilai mata kuliahnya dikonversi dari kegiatan yang dilakukan dalam Praktik Kerja. Pertanyaan yang perlu untuk dijawab apakah kegiatan yg dilakukan selama praktik kerja dapat memenuhi cakupan materi perkuliahan yang tidak dilakukan karena mengikuti program MBKM.

Tiga pihak yang berkepentingan apabila mengikuti program MBKM, yaitu: mahasiswa, institusi pendidikan, dan institusi penyedia tempat magang harus duduk bersama membuat nota kesepahaman tentang cakupan aktivitas yang dilakukan dalam pelaksanaan magang. Isi nota kesepahaman tidak dapat dibuat secara umum, melainkan harus dibuat secara terperinci agar dapat mencapai *outcome* lulusan setiap mahasiswa. Penilaian atas kegiatan yang telah dilakukan dapat memilih salah satu dari 2 model penilaian, yaitu bentuk bebas (*free form*) atau bentuk terstruktur (*structured form*) (Tohir, 2020). MBKM menekankan pada jam kegiatan (Kemdikbud, 2020), konsep ini serupa dengan yang dilakukan oleh Google dengan menyediakan fasilitas kursus untuk melakukan praktik secara langsung terhadap kasus-kasus yang terjadi. Sehingga aktivitas kegiatan yang digagas dalam MBKM dilakukan secara terstruktur dan terprogram akan memberikan penguatan keterampilan bagi peserta kegiatan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah merambah dalam kehidupan kita dan kemajuan ini diadopsi dalam dunia kerja, sehingga setiap calon karyawan harus menguasai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Mengantisipasi bermunculannya jenis pekerjaan baru seperti yang diutarakan oleh Erick

Thohir, Selasa (21/6/2022), maka 20 sks mata kuliah yang diambil dari lintas program studi dapat diarahkan untuk memilih mata kuliah yang memberikan keterampilan tentang: teknologi informasi digital, pengolahan dan visualisasi data, dan teknologi perkantoran modern.

Simpulan dan Saran

MBKM bertujuan agar calon lulusan menetapkan kompetensi lulusan yang akan dikuasai untuk berkarir apabila telah lulus studi. Penguasaan kompetensi dilakukan melalui kegiatan secara langsung pada dunia kerja, sehingga untuk menjamin kegiatannya berlangsung sesuai dengan harapan, maka peserta kegiatan, perguruan tinggi dan penyedia kegiatan harus duduk bersama untuk membahas pelaksanaan dan penilaian atas kegiatan yang akan dilakukan.

Belajar dengan melakukan praktik secara langsung terhadap kasus yang terjadi memberikan pengalaman bagi peserta kegiatan dalam menentukan solusinya. Konsep ini telah berhasil dilakukan oleh Google Inc. dalam mencari karyawan yang berpotensi untuk direkrut. Pelaksanaan MBKM masih baru diterapkan, sehingga memerlukan waktu untuk melihat hasil dari kebijakan yang dibuat.

Pengukuran keberhasilan atas kebijakan yang dibuat harus dilakukan penelitian terhadap objek yang menerapkan kebijakan tersebut berdasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan. Hasil penelitian yang diperoleh dapat dibandingkan dengan hasil penelitian atas kebijakan sebelumnya yang telah dibuat agar terdokumentasi guna kesesuaian program pendidikan perguruan tinggi dengan penyerapan calon tenaga kerja.

Daftar Pustaka

- Barnad. (2021). Learning Material in Multimedia Supporting Online Learning. *Psychology and Education*, 58, 5988–5994. <https://doi.org/https://doi.org/10.17762/pae.v58i2.3076>
- Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain*. New York: David McKay Company, Inc.
- Hidayat, R. (2017). Pendidikan Vokasi dan Link and Match untuk Memperkokoh Daya Saing Bangsa. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Vokasi*, 1(1), 1-6.
- Jacobsen, D. A., Eggen, P., & Kauchak, D. (2009). *Methods for Teaching* (8th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kemdikbud. (2020). *Kebijakan Kampus Merdeka (Independent Campus Policy)*. Ministry of Education and Culture Republic of Indonesia Report.
- Presiden Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Presiden Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi*.
- Sudjana. (2005). *Metode dan Teknik Pembelajaran Parsipatif*. Bandung: Falah Production. Susilawati. (2020). *Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka dalam Pandangan Filsafat*

Pendidikan Humanisme. Sikola: Jurnal Pendidikan dan Kajian Pembelajaran , 2 (3), 207 - 219.

Tohir, M. (2020). Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

Suryadi, D. (2015). Konsep Pendidikan: Pendekatan Interdisipliner. Bandung: Refika Aditama. UNESCO. (2015). Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the

Implementation of Sustainable Development Goal 4. Paris: Author.

Utomo, S. B. (2016). Peluang dan Tantangan Implementasi Program Link and Match dalam Pendidikan Vokasi di Indonesia. Jurnal Pendidikan Vokasi, 6(3), 322-336.

World Bank. (2012). Better Skills, Better Jobs, Better Lives: A Strategic Approach to Skills Policies. Washington, DC: Author.